

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014-2023

Alviolita Tri Amanda

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ida Aju Brahma Ratih,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur (60118)
Korespondensi penulis : alviolitamanda09@gmail.com dan brahmaratih@untag-sby.ac.id

Abstract. *This research is quantitative research, with time series data. The data used in this study is the realization data of the Pacitan Regency Regional Revenue and Expenditure Budget for the period 2014-2023. This study aims to determine the effect of local revenue and general allocation funds on regional expenditure of Pacitan Regency. The method used is descriptive statistics with multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that local revenue has a positive and significant effect on regional expenditure of Pacitan Regency. The general allocation fund has a positive and insignificant effect on regional expenditure of Pacitan Regency. Simultaneously, local revenue and general allocation funds have a positive and significant effect on regional expenditure in Pacitan Regency. The coefficient of determination (Adjusted R Square) is 0.781 or 78% which illustrates that there is a simultaneous influence between the variables of Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) on the Regional Expenditure variable, while 21.9% is influenced by other factors outside the independent variables used in the study.*

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Regional Expenditure.*

Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan data time series. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan periode 2014-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten Pacitan. Adapun metode yang digunakan statistik deskriptif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Pacitan. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Pacitan. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Pacitan. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,781 atau sebesar 78% yang menggambarkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel Belanja Daerah, sedangkan 21,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah

LATAR BELAKANG

Adanya implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat (2) dimana Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya dengan tidak bertentangan dengan kebijakan dan dasar negara Indonesia.

Regulasi mengenai kebijakan otonomi daerah Republik Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan pada setiap daerah berkembang dengan cepat, yang berdampak pada kegiatan fiskal yang memerlukan anggaran besar. Peningkatan anggaran mengakibatkan kebutuhan akan dana yang besar untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran daerah dicatat dalam APBD dan dilakukan melalui pembayaran tunai untuk kegiatan operasional, yang bersumber dari pendapatan daerah, dengan memperhitungkan biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan tersebut (Fernandes Joni dan Fauzia, 2022).

Selama ini, pengelolaan keuangan daerah masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Belanja daerah, khususnya anggaran untuk daerah belum dapat berfungsi sebagai dorongan yang efektif untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Di sisi lain, seringkali ditemukan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan penggunaannya kurang teliti, sehingga tidak mencerminkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan belanja daerah adalah rendahnya kapabilitas program dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik, serta rendahnya tingkat efisiensi dalam pelaksanaan belanja daerah. perencanaan anggaran yang lemah seringkali diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Di era otonomi ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Kabupaten Pacitan, yang terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan. Potensi ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada realisasinya anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung lebih tinggi daripada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai sumber pendanaan utama yang mencerminkan kemandirian ekonomi daerah, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan belanja daerah. Tingginya ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dapat mempengaruhi kebijakan belanja daerah. Secara umum, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Di satu sisi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dapat meningkatkan kapasitas belanja, tetapi di sisi lain, ketidakstabilan dalam pendapatan dapat menghambat perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kabupaten Pacitan.

Iqbal dkk., (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara empiris terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Abdul Wahab., (2021) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap belanja daerah, sementara dana transfer memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Secara simultan, PAD dan dana transfer secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Jayapura. Begitu juga menurut Kurniati dan Devi., (2022), menerangkan dalam penelitiannya bahwa variabel DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung, Variabel PAD berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung. DAU dan PAD secara simultan berpengaruh.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam meningkatkan belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan selama periode 2014-2023.
2. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan selama periode 2014-2023.
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

KAJIAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam kaitannya dengan politik atau pemerintah berarti kemandirian pemerintahan atau kondisi hidup di bawah hukum sendiri. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah daerah yang memiliki kemandirian hukum yang bersifat *self government* yang diatur dan diawasi oleh hukum sendiri. Sehingga otonomi dapat dikatakan lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi (Suparto, 2014). Otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (2014) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua uang yang diterima daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mardiasmo, (2002) PAD terdiri dari uang yang diterima daerah dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Sebaliknya, Darise, (2008) Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang diterima daerah dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun (2022) adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang diperoleh melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber lain yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU), yang berasal dari pendapatan APBN, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nordiawan dkk., (2010) Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap daerah.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (2004). Dana Alokasi Umum adalah dana yang ditransfer ke pemerintah daerah dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah selama pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat *block grand*, yang berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Menurut Arif dkk., (2009) Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui kas umum daerah, yang mengurangi kekayaan bersih atau ekuitas dana lancar pada tahun berjalan dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang dimiliki oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Urusan ini termasuk urusan wajib, pilihan, dan urusan yang menangani bidang tertentu yang dapat dilakukan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan secara hukum.

Fokus belanja daerah adalah untuk mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan umum. Belanja daerah harus fokus

pada prioritas efisiensi, efektivitas, dan penghematan saat digunakan. Ini diharapkan akan mendukung inisiatif strategis daerah. Semakin banyak belanja daerah, semakin banyak kegiatan perekonomian di daerah. Sebaliknya, semakin banyak pendapatan dari pajak, redistribusi, atau penerimaan masyarakat, maka semakin sedikit kegiatan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dkk., (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh , dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara empiris terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab, (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap belanja daerah, sementara dana transfer memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Secara simultan, PAD dan dana transfer secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Jayapura. Begitu juga menurut Kurniati dan Devi., (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung, menerangkan dalam penelitiannya bahwa variabel DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung, Variabel PAD berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Lampung. DAU dan PAD secara simultan berpengaruh.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini informasi yang hendak diambil adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif karena pada penelitian ini menggunakan angka-angka analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode statistika (Azwar, 2007). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pacitan dari tahun 2014 sampai dengan 2023, dan sampel pada penelitian ini adalah data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Belanja Daerah pada Laporan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan. Jumlah sampel adalah 10 tahun (2014-2023). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Metode analisis data yang dipakai menggunakan analisis statistik model analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*). Uji hipotesis menggunakan Uji koefisien determinasi parsial (R^2), Uji F (uji secara simultan), dan Uji T (uji secara parsial).

Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*)

Teknik analisis regresi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh simultan dari semua variabel tersebut. Bentuk umum model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Nuzwan & Yoedani, 2022) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y : Belanja Daerah

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Dana Alokasi Umum

α : Koefisien Konstanta

e : error

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan mencakup Uji Koefisien Determinasi Parsial (R^2), Uji F (uji secara simultan), dan Uji T (uji secara parsial).

a. Uji Koefisien Determinasi Parsial (R^2), digunakan untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2011). Analisis yang digunakan yaitu dengan melihat nilai *Adjusted R²* untuk mengevaluasi kualitas model regresi.

b. Uji F atau uji simultan, bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersamaan terhadap variabel dependen, dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis untuk Uji F adalah sebagai berikut :

1) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ artinya, secara simultan tidak ada pengaruh PAD, DAU terhadap Belanja Daerah.

- 2) $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ artinya secara simultan ada pengaruh PAD, DAU terhadap Belanja Daerah. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan :
- Jika probabilitas tingkat kesalahan $F_{hitung} < 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - Jika probabilitas tingkat kesalahan $F_{hitung} \geq 5\%$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (Ghozali, 2011).
- c. Uji T atau uji parsial, digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen, yaitu untuk menilai pengaruh setiap variabel independen yang meliputi PAD dan DAU, terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen, dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis untuk Uji T adalah sebagai berikut :
- 1) Pengaruh PAD (X_1) terhadap Belanja Daerah (Y). $H_0: \beta_1 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara X_1 terhadap Y.
 $H_a : \beta_1 > 0$, terdapat pengaruh positif signifikan antara X_1 terhadap Y.
 - 2) Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y).
 - 3) $H_0: \beta_2 \leq 0$, tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara X_2 terhadap Y. $H_a : \beta_2 > 0$, terdapat pengaruh positif signifikan antara X_2 terhadap Y. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan :
 - Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
 - Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak (Ghozali, 2011)

HASIL LUARAN YANG DICAPAI

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang dianalisis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel independen dan dependen, pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data tersebut mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan periode 2014-2023, nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	10	101.28	213.21	172.3080	37.53516
Dana Alokasi Umum	10	700.74	818.51	760.1160	41.65110
Belanja Daerah	10	1202.65	1921.21	1601.5750	192.79334
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Hasil Olah Data Berdasarkan Program SPSS, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dengan jumlah 10 sampel dapat dijelaskan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 101.28 atau sama dengan Rp. 101,276,946,020.00, nilai maximum sebesar 213.21 atau sama dengan Rp. 213,298,759,558.05, dan mean (rata-rata) sebesar 172.3080 atau sama dengan Rp. 172,317,273,158.52 dan standar deviasi sebesar 37.53516 atau setara dengan Rp. 37,547,277,522.12.
2. Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar 700.74 atau sama dengan Rp. 700,743,024,000.00, nilai maximum sebesar 818.51 atau sama dengan Rp.817,563,878,000.00, dan mean (rata-rata) sebesar 759.8650 atau sama dengan Rp. 759,769,669,448 dan standar deviasi sebesar 41.65110 atau setara dengan Rp. 41,700,198,064.70.
3. Belanja Daerah. Variabel Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 1202.65 atau sama dengan Rp. 1,202,652,371,660.00, nilai maximum sebesar 1921.21 atau sama dengan Rp. 1.921,214,125,566.32, dan mean (rata-rata) sebesar 1601.5750 atau sama dengan Rp. 1.601,575,144,052.83 dan standar deviasi sebesar 192.79334 atau setara dengan Rp. 192,793,553,479.72.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode ini digunakan untuk menguji variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B			Beta		
1	(Constant)	-429.883	660.958		-.650	.536
	Pendapatan Asli Daerah	2.911	1.087	.567	2.679	.032
	Dana Alokasi Umum	2.013	.979	.435	2.055	.079

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Olah Data Berdasarkan Program SPSS, 2024

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4.4 dapat ditulis dengan persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = -429,883 + 2,911X_1 + 2,013X_2$$

1. Nilai a (konstanta) sebesar -429,883 merupakan keadaan saat variabel belanja daerah belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2). Jika variabel independen tidak ada maka variabel belanja daerah tidak mengalami perubahan.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 2,911 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 Satuan variabel Pendapatan Asli Daerah maka akan mempengaruhi belanja daerah sebesar 2,911 Milyar, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 2,013 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 Satuan variabel Dana Alokasi Umum maka akan mempengaruhi belanja daerah sebesar 2,013 Milyar, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Dalam uji ini, apabila nilai signifikan < 0.05 atau nilai t hitung $> t$ tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Uji ini membutuhkan nilai t tabel yang dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$= (0,05/2 ; 10-2-1)$$

$$= 0,025 ; 7$$

$$= 2.364$$

Keterangan :

N = jumlah responden

k = jumlah variabel independen

$\alpha = 0,05$

Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-429.883	660.958		-.650	.536
	Pendapatan Asli Daerah	2.911	1.087	.567	2.679	.032
	Dana Alokasi Umum	2.013	.979	.435	2.055	.079

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Olah Data Berdasarkan Program SPSS, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dianalisis bahwasannya :

a. Nilai Signifikan dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) yaitu 0,032

(< 0,05) dan nilai t hitung sebesar 2,679 > 2.364. maka kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan belanja daerah.

b. Nilai Signifikan dari variabel Dana Alokasi Umum (X2) yaitu 0,079 (> 0,05) dan nilai t hitung sebesar 2.055 < 2.364. maka kesimpulannya yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Dana Alokasi Umum dengan belanja daerah.

b. Uji f

Jika nilai sign <0,05 atau nilai F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y (begitu juga sebaliknya).

$$F \text{ tabel} = F(k ; n-k)$$

$$= F(2 ; 10-3)$$

$$= F(2 ; 7)$$

$$= 4.74$$

Keterangan :

N = jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	261424.890	2	130712.445	12.517	.005 ^b
	Residual	73098.571	7	10442.653		
	Total	334523.461	9			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil yang dipaparkan dalam tabel diatas, nilai signifikasinya adalah 0,005 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan F-hitung sebesar $12.517 > F$ -tabel sebesar 4.74 sehingga kesimpulannya adalah H3 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya regresi linier berganda. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut ini :

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 ^a	.781	.719	102.18930

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,781 atau sebesar 78% yang menggambarkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel Belanja Daerah, sedangkan 21,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis data diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah tahun 2014-2023. Nilai α (konstanta) diperoleh sebesar -429,883 dan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 2,911 sehingga persamaan regresi untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan dari tahun 2014-2023 adalah $Y = -429,883 + 2,911 X_1$. Persamaan tersebut memiliki arti bahwa Pendapatan Asli Daerah (X₁) naik satu persen (1%) maka Belanja

Daerah (Y) akan meningkat sebesar 2,911 (291,1%). Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah (Y) dilakukan dengan menggunakan Uji T. Nilai t hitung sebesar 2,679 yang lebih besar dari t tabel 2,364 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$ menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) Kabupaten Pacitan tahun 2014-2023.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber yang dihasilkan sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah tahun 2014-2023. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar juga penerimaan yang dapat dialokasikan untuk penyediaan dan pengadaan layanan serta fasilitas publik yang berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan besaran belanja daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iqbal dkk., (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wahab, (2021) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah namun, tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan tahun 2014-2023. Nilai konstanta α (konstanta) diperoleh sebesar -429,883 dan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 2,013 sehingga persamaan regresi untuk mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan dari tahun 2014-2023 adalah $Y = -429,883 + 2,013 X_2$. Persamaan tersebut memiliki arti bahwa Dana Alokasi Umum (X2) naik satu persen (1%) maka Belanja Daerah (Y) akan meningkat sebesar 2,031 (203,1%) dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum (X₂) terhadap Belanja Daerah (Y) dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung sebesar 2,055 yang kurang dari t tabel 2,364 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,079 > 0,05$ yang artinya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, adapun penyebab dari hal tersebut ialah daerah yang sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum tidak efisien dalam mengelola anggaran, sehingga peningkatan Dana Alokasi Umum tidak selalu sebanding dengan peningkatan Belanja Daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofiyani dan Subadriyah, (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif akan tetapi, tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Iqbal dkk., (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian data diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Adapun, nilai $F = 12,517$ dan signifikansi $0,0005 (< 0,05)$ artinya, kedua variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi Belanja Daerah secara nyata. Dengan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,781 atau sebesar 78% yang menggambarkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel Belanja Daerah, sedangkan 21,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) secara individu tidak signifikan ($Sig = 0,079$), keberadaanya bersama PAD memberikan kontribusi signifikan secara keseluruhan. PAD memiliki pengaruh yang lebih kuat karena signifikan secara individual ($Sig = 0,032$) dan

memiliki koefisien lebih besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Daerah yang memiliki PAD lebih tinggi cenderung lebih mandiri secara fiskal dan mampu meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan belanja, baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak selalu diikuti oleh peningkatan yang signifikan dalam Belanja Daerah.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis melalui hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Daerah, diharapkan untuk terus menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pendanaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) secara efisien untuk meningkatkan mutu pelayanan publik., bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan daerah dengan melibatkan lebih banyak kabupaten dan kota, tidak hanya Kabupaten Pacitan agar hasil penelitian menjadi lebih representatif dan dapat mencerminkan kondisi yang lebih luas, serta Variabel yang digunakan dalam penelitian di masa depan diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lainnya, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Arif, Bahtiar, Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Akademia.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. PT Indeks, Jakarta.
- Fernandes Joni, & Fauzia, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2017-2020. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 187–197.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS versi 19*. BP Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja

- Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3422>
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187–208. <https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Nordiawan, Deddi, & Ayuningtiayas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2* (p. 26). Jakarta : Salemba Empat.
- Nuzwan, S., & Yoedani. (2022). *ANALISIS STATISTIK REGRESI LINIER BERGANDA*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 21. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>
- Sofiyani, L., & Subadriyah. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 4(1), 33–47. <http://lib.unnes.ac.id/17688/1/7250407094.pdf>
- Suparto, S. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24, 10.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, Pub. L. No. 1, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 33 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 282, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wahab, L. O. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 25–41. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.69>